



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Sao-Sao Nomor 10 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telepon 0401-3129403 Faksimile 0401-3129441

SIARAN PERS

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara

Kendari, **Selasa (06 Juni 2023)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa 06 Juni 2023. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA, kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, **H. Abdurrahman Shaleh, S.H, M.Si.**; Gubernur Sulawesi Tenggara, **H. Ali Mazi, S.H.**

Selain Ketua DPRD dan Gubernur, turut hadir, para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, para Pimpinan Instansi Vertikal, dan para undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memperoleh **mandat** sebagai **satu kewajiban konstitusional** untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ini, ditujukan untuk, **memberikan opini** atas Kewajaran Laporan Keuangan, dengan memperhatikan pada **empat** hal, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN, dapat **disimpulkan** bahwa, **penyusunan Laporan Keuangan telah sesuai dengan SAP Berbasis AkruaI, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan** yang berpengaruh langsung dan material. Selain itu, pelaksanaan program atau kegiatan dan pelaporan keuangan tahun anggaran 2022, **telah didukung** dengan **Sistem Pengendalian Intern** yang **cukup efektif. Sehingga, BPK menyimpulkan bahwa, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 adalah “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” atau “WTP”.**

Pencapaian opini WTP menunjukkan adanya **komitmen** Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran Perangkat Daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari **sinergi** dari seluruh pemangku kepentingan, dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

BPK, secara khusus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berhasil meraih penghargaan APBD *Award 2023* tingkat nasional untuk kategori Provinsi, sebagai Peringkat III Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022. Semoga prestasi yang telah diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi penambah semangat untuk perbaikan-perbaikan kedepannya dan bisa menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara, merupakan buah manis dari perjuangan reformasi 25 (dua puluh lima) tahun lalu. Reformasi mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, serta, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara/daerah. Pengelolaan keuangan negara menjadi lebih desentralisasi yang memberikan alokasi keuangan lebih besar kepada daerah juga merupakan dampak dari reformasi. Dengan alokasi keuangan yang lebih besar mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh pemerintah daerah, dan peran pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting untuk memastikan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat daerah.

Namun demikian, BPK masih menemukan **permasalahan** yang hendaknya menjadi **perhatian** Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di antaranya:

1. Kelemahan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal, berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan.
2. Kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap ditunjukkan dengan adanya permasalahan:
 - a) Aset Tetap tidak ditemukan, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan Barang Habis Pakai masih tersaji di Aset Tetap;
 - b) Aset Tetap Tanah bersengketa belum diselesaikan; dan
 - c) Penyimpanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak memadai.Permasalahan Aset Tetap tersebut mengakibatkan penyajian Aset Tetap tidak akurat, risiko kehilangan Aset Tetap Tanah dan risiko penyalahgunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki kebijakan akuntansi atas Properti Investasi. Hal ini mengakibatkan aset tanah dan bangunan yang dapat menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk meningkatkan nilai aset belum dapat disajikan dalam Neraca secara informatif untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opininya sudah WTP, namun tetap **dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan** dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain penyampaian LHP LKPD, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah atau IHPD tahun 2022, guna memberikan **dorongan bagi Gubernur**, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya, kepada pemerintah kabupaten/kota, **dan bagi DPRD untuk** melaksanakan fungsi pengawasan. IHPD yang kami sampaikan, memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022.

BPK mengharapkan LHP dapat **dimanfaatkan** oleh para **Pimpinan** dan **Anggota DPRD** Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka melaksanakan **fungsinya**, baik **fungsi anggaran**, **fungsi legislasi** maupun **fungsi pengawasan**, untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 maupun pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BPK juga mengingatkan kepada **Gubernur** beserta jajarannya, supaya rekomendasi yang diberikan oleh BPK, **agar segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari** setelah LHP ini diserahkan.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, sampai dengan Semester II Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti dengan **status sesuai** sebanyak 1.140 rekomendasi atau sebesar 77,14% dari jumlah keseluruhan rekomendasi, sementara itu target sebagai pertanda akuntabilitas yang baik adalah sebesar **80%**.

Dengan demikian, masih terdapat 22,86% atau 360 rekomendasi yang **berstatus dua** atau **belum selesai ditindaklanjuti** dan **berstatus tiga** atau **belum ditindaklanjuti**, menjadi prioritas untuk segera diselesaikan tindaklanjutnya. Jumlah tersebut tentu **akan bertambah** dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan ini.

BPK berharap pada Tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satu yang harus digarisbawahi, pencapaian Opini “**Wajar Tanpa Pengecualian**” **pun akan sia-sia**, jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Tenggara **belum tercapai**.

Pimpinan BPK RI, menyampaikan **ucapan terima kasih** yang **setinggi-tingginya** kepada **DPRD** Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah mendukung upaya BPK RI, dalam mewujudkan visi dan misinya, yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara, untuk mencapai tujuan Negara, melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Selain itu, dengan hati yang tulus, Pimpinan BPK RI menyampaikan **terima kasih** kepada **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara** beserta jajarannya, yang telah memberikan perhatian dan dukungan, dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan, atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, oleh BPK RI.

Publikasi:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Jalan Sao-Sao Nomor 10 Kendari, Sulawesi Tenggara

<http://sultra.bpk.go.id>